

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggita, S. A. (2020). *Implementasi kebijakan program kartu kredit pemerintah di Kantor Pertanahan Kota Bogor* [Tugas Akhir]. Universitas Padjadjaran.
- Arfandi, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2022). Implementasi kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(1).
- Arianti. (2003). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Suadi. (1999). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1995). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Elmizar, & Kasmadi. (2020). Analisis implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3).
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: Ya3.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Feriyanto, A., & Triana, E. S. (2015). *Pengantar manajemen*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Follet, M. P. (2007). *Manajemen*. Jakarta : Indeks.
- Fuady, M. (2006). *Hukum tentang pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gitman, L. J. (2003). *Principles of managerial finance* (7 ed.). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Hartono, Sri Redjeki. 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Hendratmi, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh transparansi dan komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2).
<https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.767>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2).
<https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi penelitian* (1 ed.). Depok : Rajawali Pers.
- Husnan, S. (2015). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (7 ed.). Makasar:UPP STIM YKPN.
- Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK. *INTEGRITAS*, 3(2).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>
- Irwin, R., & Nahartyo, E. (2020). *Strategi implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran transaksi belanja negara : Kasus pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
<http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Iswanto, A. C., & Wahjono. (2019). Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap ilmu akuntansi. *Infokam*, 1.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan World Bank Group. 2014. *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif* . Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan.
- Kurniati, P. N., & Nugroho, B. Y. (2019). Urgensi pelaksanaan sistem cashless government dalam membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2).
- Mardalis. (2014). *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (1 ed.). Jakarta : Bumi Aksara.
- Maulid, L. C., & Sudiby, Y. A. (2020). Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: Permasalahan dan solusi. *Akuntabel*, 17(2).
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. Ch. (2019). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(9). <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23435.19.9.2019>
- Muhadjir, N. (2013). *Metodologi penelitian kebijakan dan evaluasi kebijakan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhlizi, A. F. (2016). Penguatan akses informasi publik melalui teknologi informasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara. *Rechts Vinding*, 5(2), 149–163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i2.137>
- Nabila, P. S., & Silalahi, P. R. (2022). Optimalisasi good governance dalam meningkatkan pengelolaan anggaran pemerintah ke desa di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Nasution, M. P. (2003). Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. *Jurnal Forum Inovasi Desember-Februari*.

- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik* (2 ed.). Jakarta : Salemba Empat. <https://doi.org/9789790611139>
- Novitasari, T. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (Studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1>
- Reddy, K. S., & Raj, K. D. (2017). Impact of credit cards and debit cards on currency demand and seigniorage: Evidence from India. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 21(3).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis* (6 ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sucianingsih, A. A. (2018). *Kritik pengamat atas penggunaan kartu kredit dalam penggunaan anggaran nasional*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kritik-pengamat-atas-penggunaan-kartu-kredit-dalam-sistem-penggunaan-anggaran>
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, N. (2012). *Penelitian dan penilaian pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 74–81.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 3(3). <https://doi.org/10.32493/skt.v3i3.5089>
- Sundjaja, R. S., & Barlian, I. (2022). *Manajemen keuangan* (4 ed., Vol. 1). Jakarta : PT. Prehalindo.
- Suryahadibroto, M. (1990). *Dasar-dasar ekonomi moneter*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas kebijakan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifudin. (2005). *Administrasi pembiayaan pendidikan* (hlm. 89). Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Tiwinarni. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Dalam *Tidak diterbitkan* (Vol. 135).
- Tjandra, W. R. (2013). *Hukum keuangan negara*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Vikrama, A. A. (2017). Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Inventarisasi Bmd pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. *Citizen Charter*, 2(2).

Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meminimalisir moral hazard pengelola keuangan negara melalui implementasi kartu kredit pemerintah. *Otonomi*, 20(2).

Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(1983).

